

# JOURNAL OF BUSINESS AND INFORMATION SYSTEMS



Vol. 2, No. 1, Juni 2020

E-ISSN: 2685-2543

[www.thejbis.org](http://www.thejbis.org)

# JOURNAL OF BUSINESS AND INFORMATION SYSTEMS (E-ISSN: 2685-2543)

## Editorial Team

### Editor in Chief

Dekeng Setyo Budiarto (Scopus ID: 57195224862) Universitas PGRI Yogyakarta

### Editorial Board:

Ratna Purnamasari (Scopus ID: 57202952684) Universitas PGRI Yogyakarta

Yennisa (Scopus ID: 57202952865) Universitas PGRI Yogyakarta

Marti Widya Sari (Scopus ID: 57193861410) Universitas PGRI Yogyakarta

Dian Indri Purnama Sari (Scopus ID: 57191405180) UPN Veteran Yogyakarta

Sri Wahyu Agustiningsih (Scopus ID: 56743282100) Univet Bangun Nusantara Sukoharjo

Erna Setiany (Scopus ID: 56743334800) Universitas Mercu Buana Jakarta

Krismiaji (Scopus ID: 57191952982) Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta

Setianingtyas Honggowati (Scopus ID: 57021776600) Universitas Sebelas Maret Surakarta

Antonius Singgih Setiawan (Scopus ID: 57211934105) Universitas Katolik Musi Charitas Palembang

Ⓞ Editorial Team

Ⓞ Peer Review Process

Ⓞ Focus & Scope

Ⓞ Publication Ethics

Ⓞ Author Guidelines

Ⓞ Online Submission Guidelines

Ⓞ Plagiarism Policy

Ⓞ Article Processing Charge

Ⓞ Open Access Policy

Ⓞ Copyright Notice

Ⓞ ISSN ROAD

### INFORMATION

Ⓞ For Readers

Ⓞ For Authors

Ⓞ For Librarians

For the Article Templates,  
Click on the Icon Below :



RECOMMENDED TOOLS :





## Apa yang mempengaruhi kinerja aparatur Pemerintah Daerah?

Vidya Vitta Adhivinna

[adhivinna@upy.ac.id](mailto:adhivinna@upy.ac.id)

Aulia Syahadatun Dinuriah

Universitas PGRI Yogyakarta

**Abstract:** *This study aims to determine the effect of budget participation, organizational commitment, and public accountability on regional government apparatus' performance. The population in this study were employees of Kulon Progo Regional Organizations. The number of samples used in this study was 96 respondents with the method of determining the sample using the purposive sampling method. The data were analyzed with multiple linear regression to test the hypotheses. The result of this study indicates that budget participation and public accountability have a significant impact on the employee's performance of regional government, and organizational commitment does not significantly affect local government apparatus' performance.*

**Keywords:** *Budget participation; organizational commitment; public accountability; performance.*

### 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk menerapkan asas-asas pelayanan publik (Badri *et al.*, 2016). Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, wajib memiliki perencanaan yang tersusun dalam bentuk anggaran. Rencana yang tersusun secara baik akan menjadi pedoman dalam setiap melaksanakan tugas (Sari *et al.*, 2014).

Kinerja aparat pemerintahan dinilai melalui alat ukur *financial* dan *non-financial*, dimana kinerja dinilai dari seberapa besar kemampuan pegawai dalam mencapai target yang telah dianggarkan (Agusti, 2012). Pemerintah daerah dalam melaksanakan proses penyusunan anggaran diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan (Sari *et al.*, 2014). Partisipasi anggaran dalam pemerintahan menunjukkan pada seberapa besar partisipasi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang telah diusulkan (Jalaluddin & Bahri, 2009).

Kesuksesan suatu organisasi pemerintah dipengaruhi oleh komitmen dari pegawai yang mengharapkan kesuksesan di organisasi. Pegawai pemerintah yang memiliki komitmen akan memahami atau menghayati terhadap tujuan organisasi (Suryana *et al.*, 2018). Salah satu faktor yang mendorong para manajer dan bawahan bekerja keras dalam mencapai tujuan organisasi adalah komitmen organisasi yang kuat (Putri, 2013). Akuntabilitas publik penting dalam meningkatkan kinerja. Adanya akuntabilitas publik maka masyarakat akan mengetahui anggaran yang telah disusun dan mengetahui pertanggungjawaban atas anggaran (Putra, 2013).

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), rata-rata nilai pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada tahun 2016 hanya 49,87%. Sebanyak 425 pemerintah daerah, atau 83% kabupaten dan kota kinerjanya masuk kategori nilai C. Pada tahun 2018, Kabupaten Kulon Progo sudah mendapatkan nilai A ([www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kinerja OPD Kabupaten Kulon Progo dapat meningkat lebih baik.

Meskipun riset yang meneliti kinerja aparatur pemerintah daerah telah banyak dilakukan, namun penelitian ini masih menarik karena: pertama, penelitian ini memodifikasi variabel dengan cara menambah variabel penelitian yaitu akuntabilitas publik karena akuntabilitas merupakan wujud organisasi dalam menunjukkan kegagalan atau keberhasilan ([Jamaluddin 2017](#)). Kedua, penelitian terdahulu menyatakan adanya ketidakkonsistenan antara partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian [Yenti \(2013\)](#) menyatakan bahwa komitmen organisasi dan partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian [Chandrakusuma dan Jatmiko \(2017\)](#) menyatakan bahwa komitmen organisasi dan partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

## **2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah dinilai dari kegiatan yang dilakukan oleh para pemegang kepentingan dalam suatu organisasi pemerintahan. Pengukuran kinerja aparatur pemerintah diukur melalui alat ukur *financial* dan *non-financial*. Partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan manajer dan bawahan dalam penentuan tujuan anggaran dalam organisasi. Penentuan tujuan anggaran merupakan tanggung jawab manajer ([Amril, 2014](#)). Semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran, maka semakin tinggi pula kinerja aparat pemerintah daerah ([Nazaruddin dan Setyawan, 2012](#)). Adanya partisipasi oleh aparat pemerintah daerah, maka para aparat akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang harus diemban.

Kinerja organisasi pemerintah akan menjadi lebih baik, sehingga semakin tinggi partisipasi aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan Pemerintah Daerah ([Wulandari, 2013](#)). Hasil penelitian [Mediaty \(2010\)](#); [Wulandari \(2013\)](#); [Amril \(2014\)](#); dan [Nafinia et al., \(2016\)](#) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

*H<sub>1</sub>: Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.*

### **Komitmen organisasi**

Komitmen organisasi adalah sikap karyawan yang berpihak dan memiliki loyalitas terhadap organisasi dan tujuan organisasi ([Nafinia et al., 2016](#)). Komitmen organisasi merupakan suatu tindakan/dorongan yang berasal dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dengan tujuan agar organisasi dapat berhasil. Individu lebih mementingkan kepentingan organisasi agar menunjang keberhasilan organisasi ([Suryana et al., 2018](#)).

Pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi dan dapat menghasilkan kinerja yang baik pada organisasi (Putri, 2013). Hasil penelitian Wulandari (2013) dan Nafinia *et al.*, (2016) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

*H<sub>2</sub>: Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.*

### **Akuntabilitas publik**

Akuntabilitas dalam arti sempit adalah suatu bentuk pertanggungjawaban organisasi (pekerja individu). Sedangkan akuntabilitas dalam arti luas adalah suatu bentuk kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan kepada pihak pemberi amanah (Mahsun *et al.*, 2013). Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik. Adanya akuntabilitas publik, masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Akuntabilitas publik mempengaruhi tingkat kinerja manajerial (Putra, 2013). Akuntabilitas publik merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik kepada DPRD dan masyarakat (Ningsih, 2017). Hasil penelitian Hazmi *et al.*, (2012); menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

*H<sub>3</sub>: Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.*

## **3. Metode Penelitian**

### **Definisi Operasional Variabel**

Kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur *finansial* dan *non-finansial* (Badri *et al.*, 2016). Menurut Mahoney (1963) dan Sari *et al.*, (2017), indikator untuk menilai kinerja manajerial menggunakan indikator perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negosiasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan. Pengukuran variabel kinerja aparatur pemerintah daerah menggunakan instrument dari (Mahoney, 1963; Putri, 2013). Setiap responden diminta untuk mengukur sendiri kinerja dengan memilih dan/atau menuliskan skala antara 1-5. Skala 1-2 mewakili kinerja dibawah rata-rata, skala 3 mewakili kinerja rata-rata, dan skala 4-5 mewakili kinerja diatas rata-rata. Kuesioner menggunakan 9 item pertanyaan

Partisipasi anggaran merupakan suatu proses untuk menilai individu dalam bekerja mengenai tingkat pencapaian target anggaran. Setiap individu akan dievaluasi, diberi penghargaan maupun hukuman (Chong dan Chong, 2002). Indikator yang menilai partisipasi anggaran menurut Wulandari (2013) antara lain: 1) keikutsertaan dalam penyusunan

anggaran, 2) kepuasan dalam penyusunan anggaran, 3) besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran akhir, 4) kebutuhan memberikan pendapat. Kuesioner menggunakan 8 item pertanyaan untuk menanyakan responden mengenai seberapa penting dan berpengaruh kontribusi responden terhadap penyusunan anggaran organisasi.

Komitmen organisasi merupakan suatu tingkat kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan organisasi serta rasa ingin tetap berada dalam organisasi (Wati, 2013). Indikator untuk menilai komitmen organisasi menurut Robbin (2008); Nafinia *et al.*, (2016) sebagai berikut:

- 1) Komitmen afektif merupakan perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan didalam nilai-nilainya. Indikator komitmen afektif yaitu:
  - a. Usaha untuk membuat organisasi menjadi sukses.
  - b. Kebanggaan bekerja pada organisasi.
  - c. Kesiediaan untuk menerima semua jenis pekerjaan demi organisasi.
- 2) Komitmen berkelanjutan merupakan nilai ekonomi yang dirasakan dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi. Indikator komitmen berkelanjutan yaitu:
  - a. Senang atas pilihan bekerja pada organisasi.
  - b. Anggapan bahwa organisasi tempat bekerja merupakan organisasi yang baik.
  - c. Perhatian terhadap kelangsungan organisasi.
- 3) Komitmen normatif merupakan kewajiban seseorang untuk bertahan didalam suatu organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Indikator komitmen normatif yaitu:
  - a. Kesamaan nilai individu dengan nilai organisasi.
  - b. Kebanggaan menjadi bagian organisasi.
  - c. Organisasi menginspirasi dalam pelaksanaan tugas.

Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan pemerintah kepada publik (Hazmi *et al.*, 2012). Terdapat 4 (empat) dimensi/indikator akuntabilitas publik yang harus dipenuhi sektor publik menurut Mardiasmo (2018) yaitu: Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum; akuntabilitas proses; akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kulon Progo. Sampel penelitian ini yaitu kepala dinas/kantor/badan, sekretaris, kepala sub bagian (kasubbag). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan badan/dinas/kantor dilakukan dengan alasan bahwa instansi merupakan OPD sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah.
2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala badan/dinas/kantor, sekretaris, dan kepala sub bagian (kasubbag) OPD Kabupaten Kulon Progo.
3. Masa jabatan responden minimal 1 tahun dengan pendidikan minimal D3.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Responden dalam penelitian ini merupakan pegawai yang menjabat sebagai kepala dinas atau badan, kasubag dan sekretaris. Hasil analisis terhadap dikribsi responden ditunjukkan pada tabel 1 dan tabel 2.

**Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

| No.   | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|-------|---------------|--------|------------|
| 1.    | Laki-laki     | 54     | 56,2%      |
| 2.    | Perempuan     | 42     | 43,8%      |
| Total |               | 96     | 100%       |

Berdasarkan tabel 1 diatas jumlah responden terbesar adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 54 orang atau 56,2% dan sisa responden adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 42 orang atau 43,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki.

**Tabel 2. Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan**

| No.   | Jabatan                          | Jumlah | Persentase |
|-------|----------------------------------|--------|------------|
| 1.    | Kepala Dinas/Kantor/Badan        | 15     | 15,6%      |
| 2.    | Sekretaris                       | 23     | 24,0%      |
| 3.    | Kasubag Umum                     | 20     | 20,8%      |
| 4.    | Kasubag Perencanaan              | 11     | 11,5%      |
| 5.    | Kasubag Keuangan                 | 12     | 12,5%      |
| 6.    | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | 11     | 11,5%      |
| 7.    | Kasubag Kajian Per-UU-an         | 1      | 1,0%       |
| 8.    | Kasubag RT & Perlengkapan        | 1      | 1,0%       |
| 9.    | Kasubag Persidangan & Risalah    | 1      | 1,0%       |
| 10.   | Kasubag TU & Kepegawaian         | 1      | 1,0%       |
| Total |                                  | 96     | 100%       |

### 4.2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Pengujian kualitas data dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang dibagi menjadi 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Terdiri dari 8 pertanyaan untuk  $X_1$ , 10 pertanyaan untuk  $X_2$ , 9 pertanyaan untuk  $X_3$ , dan 9 pertanyaan untuk  $Y$ . Instrumen dinyatakan valid jika nilai  $p$  value  $< 5\%$  (Ghozali, 2018). Tabel 3 merupakan contoh hasil pengujian validitas untuk variabel partisipasi anggaran. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen memiliki nilai  $p$  value  $< 5\%$  sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pada variabel partisipasi anggaran adalah valid.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Anggaran**

| Instrumen      | P Value | Keterangan |
|----------------|---------|------------|
| Instrumen x1.1 | 0,000** | Valid      |
| Instrumen x1.2 | 0,000** | Valid      |
| Instrumen x1.3 | 0,000** | Valid      |
| Instrumen x1.4 | 0,000** | Valid      |
| Instrumen x1.5 | 0,000** | Valid      |
| Instrumen x1.6 | 0,000** | Valid      |
| Instrumen x1.7 | 0,014*  | Valid      |
| Instrumen x1.8 | 0,001** | Valid      |

\*\*signifikansi < 1%, \*signifikansi < 5%.

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal apabila memberikan nilai *cronbach's alpha*  $\geq 0,70$  (Ghozali, 2018).

**Tabel 4 Hasil uji reliabilitas**

| Variabel                               | Cronbach Alpha |
|--|----------------|
| Partisipasi Anggaran (X <sub>1</sub> ) | 0,730          |
| Komitmen Organisasi (X <sub>2</sub> )  | 0,886          |
| Akuntabilitas Publik (X <sub>3</sub> ) | 0,927          |
| Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y) | 0,925          |

### 4.3. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil uji t untuk variabel partisipasi anggaran diperoleh nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  sehingga hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima. Hasil uji t variabel pengaruh komitmen organisasi diperoleh nilai signifikansi  $0,293 > 0,05$  sehingga hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) ditolak. Hasil uji t variabel pengaruh akuntabilitas publik diperoleh nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$  sehingga hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) diterima.

**Tabel 5. Hasil uji hipotesis**

| Variabel             | B      | P Value | Hasil                     |
|----------------------|--------|---------|---------------------------|
| (Constant)           | -9,949 | 0,104   |                           |
| Partisipasi Anggaran | 0,908  | 0,000   | H <sub>1</sub> :Diterima  |
| Komitmen Organisasi  | -0,125 | 0,293   | H <sub>2</sub> : Ditolak  |
| Akuntabilitas Publik | 0,564  | 0,002   | H <sub>3</sub> : Diterima |

F Hitung = 21,012; Adjusted R Square = 0,387

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Semakin tinggi partisipasi anggaran maka semakin tinggi kinerja aparatur pemerintah daerah. Manfaat dari tingginya partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah dapat menghasilkan informasi yang efektif antara atasan dan bawahan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Partisipasi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi (Wulandari, 2013). Hal ini juga didukung oleh penelitian Mediaty (2010); Wulandari (2013); Amril (2014); dan Nafinia *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas yang dibebankan harus memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan hambatan-hambatan pada diri karyawan (Zuraida *et al.*, 2013). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan karena dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Pimpinan belum mampu mengatasi dan menyelesaikan hambatan pada diri karyawan. Hal ini juga didukung oleh penelitian [Yenti \(2013\)](#) dan [Abdullah \(2010\)](#) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya akuntabilitas publik setiap atasan pada semua tingkatan OPD akan meningkatkan kinerja aparatur. Akuntabilitas publik dapat meningkatkan kinerja manajerial. Adanya akuntabilitas publik, maka masyarakat akan dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ([Hazmi et al., 2012](#)). Hal ini didukung oleh penelitian [Hazmi et al., \(2012\)](#) dan [Putra \(2013\)](#) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja.

## **5. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi anggaran dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Namun Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini memiliki keterbatasan dan saran antara lain:

1. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian berikutnya diharapkan menambah metode penelitian yaitu observasi atau pengamatan langsung sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat menggali/menjawab seluruh tujuan penelitian. Selain itu, untuk memastikan bahwa jawaban responden adalah jawaban yang sebenarnya.
2. Variabel yang digunakan hanya sebatas partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan akuntabilitas publik. Sedangkan jika dilihat dari uji koefisien determinasi masih banyak faktor diluar variabel tersebut yang dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memodifikasi, menambah, atau mengganti variabel independen yang memiliki keterkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah daerah, seperti, desentralisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, budaya organisasi, *locus of control* atau gaya kepemimpinan.

## **Daftar Pustaka**

- Abdullah, A. (2010). Pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bengkulu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 1-16.
- Agusti, R. (2012). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dengan dimoderasi oleh variabel desentralisasi dan budaya organisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi*, 20(03).

- Amril, V. N. (2014). Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Badri, K., Nasir, A., & Idrus, R. (2016). pengaruh partisipasi anggaran, peran kuasa pengguna anggaran, kejelasan sasaran anggaran di moderasi oleh budaya organisasi terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 609-622.
- Chandrakusuma, D.A., & Jatmiko, B (2017). Dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 24(1),
- Chong, V. K., & Chong, K. M. (2002). Budget goal commitment and informational effects of budget participation on performance: A structural equation modeling approach. *Behavioral Research in Accounting*, 14(1), 65-86.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hazmi, Y., Imran, A., Zuarni, Y. I., & Safrizal, S. H. (2012). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial aparatur Pemerintahan Kota Lhokseumawe, Studi Empiris pada SKPK Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2).
- Jamaluddin, Y. (2017). Analisis terhadap indikator pengukuran akuntabilitas kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Jurnal Tapis*, 14(1), 74-86
- Jalaluddin, J., & Bahri, D. (2009). pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 2(1), 44-53.
- Mahoney, T. A. (1963). *Development of managerial performance: A research approach*: South-western Publishing Company.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yoyakarta: Andi.
- Mediaty, M. (2010). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Majalah Ekonomi*, 20(3).
- Nazaruddin, I., & Setyawan, H. (2012). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi, motivasi, desentralisasi, dan *job relevant information* sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 197-207.
- Nafinia, D., Fitriah, E., & Lestari, R. (2016). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. *Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Ningsih, Y. I. (2017). pengaruh karakteristik penganggaran, penerapan sistem informasi akuntansi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(3), 177-195.
- Putra, D. (2013). Pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1(1).

- Putri, G. Y. (2013). Pengaruh komitmen organisasi dan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (SPIP) terhadap kinerja manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1(1).
- Robbins, S. P. (2008). *Organizational Behavior*: Pearson Publication.
- Sari, L. P. D. M., Adiputra, I. M. P., & Yuniarta, G. A. (2014). pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Sari, M., Basri, H., & Indriani, M. (2017). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 6(3).
- Suryana, G. A., Sujana, E., & Julianto, I. P. (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi, dan kompensasi terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Wati, E. (2013). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kab. Tanah Datar). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1(2).
- Wulandari, N. (2013). pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1(1).
- Yenti, D. (2013). Pengaruh motivasi, komitmen organisasi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja organisasi (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1(1).
- Zuraida, L., Novitasari, D., & Sudarman, A. (2013). Pengaruh kepemimpinan, tuntutan tugas, beban kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional pada pegawai PDAM Kota Magelang. *Ekbisi*, 7(2).